

**ANALISIS PENGARUH BELANJA MODAL, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
MANAJEMEN SERTA KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
(SUATU TELAAH EMPIRIK KABUPATEN/KOTAPROVINSI JAWA TIMUR)**

Luluk Khomsiyah, Siti Komariyah, Lili Yuliaty,
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

Abstract

The purpose of this study was to describe the area of capital expenditures, management effectiveness, and efficiency and financial independence in the area of East Java province in 2013 and to analyze the influence of local capital expenditures, management effectiveness, and efficiency as well as financial independence toward economic growth in the area of East Java Province 2013. This type of research was explanatory research in this study is the province of East Java during Fiscal Year 2013. The data used in this study were cross sectional 2013, The variable were capital expenditure, management efficiency and effectiveness and financial independence regions and economic growth. The analysis showed that capital expenditure hadn't significant effect to economic growth. The effectiveness of management had a significant effect on economic growth. Efficient financial management had a significant effect on economic growth. Local independence had significant effect on economic growth. The conclusion of this study were management effectiveness, and efficiency and financial independence had significant effect on economic growth. While capital expenditure have not significant effect to economic growth

Keywords: capital expenditure areas, the effectiveness, efficiency management, local financial independence and economic growth organization, competence and performance

1. Pendahuluan

Pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang ditunjukkan oleh membaiknya pendapatan perkapita, menurunnya angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kondisi ini menunjukkan besarnya pertumbuhan ekonomi menurut sektor di Provinsi Jawa Timur yang semuanya mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif walaupun ada sedikit penurunan di setiap sektornya. Kemampuan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah dirasakan masih terlalu lemah. Pemerintah Daerah belum menjalankan fungsi dan perannya secara efisien. Pemborosan adalah fenomena umum yang terjadi di berbagai unit kerja Pemerintah Daerah. Kondisi seperti ini muncul karena pendekatan umum yang digunakan dalam penentuan besar alokasi dana untuk tiap kegiatan adalah pendekatan *incrementalism*, yang didasarkan pada perubahan satu atau lebih variabel yang bersifat umum, seperti tingkat inflasi dan jumlah penduduk. Bila tingkat inflasi dan jumlah penduduk meningkat maka besar alokasi dana untuk tiap kegiatan yang sudah tertentu akan meningkat dari besar alokasi semula (Wahyuni, 2013). Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 menyebabkan perubahan dalam manajemen keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah perlunya dilakukan reformasi anggaran (*budgeting reform*). Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaandan pertanggungjawaban anggaran.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mendiskripsikan belanja modal daerah, efektivitas, dan efisiensi manajemen serta kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2013; untuk menganalisis pengaruh belanja modal daerah, efektivitas, dan efisiensi manajemen serta kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory* yaitu penelitian yang menjelaskan pengaruh variabel bebas meliputi pengaruh belanja modal, efektivitas, efisiensi manajemen dan kemandirian keuangan daerah terhadap variabel terikat yakni pertumbuhan ekonomi (Sugiyono, 2008:56).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur selama Tahun Anggaran 2013. Pemilihan Provinsi Jawa Timur sebagai objek penelitian karena Provinsi Jawa Timur mengalami perkembangan yang fluktuatif dari sisi ekonomi dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan kemajuan ekonomi di berbagai sektor

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *data cross sectional* tahun 2013. Data penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber:

- Data Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan, diperoleh dari Pendapatan Regional Provinsi Jawa Timur (BPS), Potensi Daerah Provinsi Jawa Timur (Bappeda).
- Data Realisasi APBD dan Target APBD, diperoleh dari Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Timur (BPS), Provinsi Jawa Timur Dalam Angka (BPS).
- Data Pengeluaran Belanja Daerah dan Pendapatan Daerah, diperoleh dari Provinsi Jawa Timur Dalam Angka (BPS), Indikator Ekonomi Provinsi Jawa Timur (BPS).

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah belanja modal, efisiensi manajemen keuangan daerah, efektivitas manajemen keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi

Metode analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh belanja modal, efektivitas, efisiensi manajemen dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Model regresi berganda yang digunakan (Dajan, 2000:193) adalah:

$$Y = b_0 + b_1BM + b_2FIMKD + b_3FEMKD + b_4KKD + e$$

keterangan:

- Y = pertumbuhan ekonomi;
BM = belanja modal;

FIMKD = efisiensi manajemen keuangan daerah;
FEMKD = efektivitas manajemen keuangan daerah;
KKD = kemandirian keuangan daerah

3. Hasil Penelitian

3.1 Deskripsi Variabel

1). Belanja Modal

Jumlah pagu belanja pada APBD Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan tren kenaikan. Pagu belanja pada TA 2011 sebesar 42,917 triliun rupiah naik menjadi 49,453 triliun rupiah dan pada TA2013 nilai tersebut menjadi 62,656 triliun rupiah. Capaian penyerapan belanja TA 2013 adalah sebesar 88,98% yaitu sejumlah 55,751 triliun rupiah dari pagu alokasi sebesar 62,656 triliun rupiah. Pada TA 2013, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur menganggarkan 12,570 triliun rupiah untuk membiayai belanja modalnya. Nilai tersebut adalah 20,06% dari total pagu belanja. Namun demikian serapan belanja ini kurang optimal, hanya mencapai 79,18% saja atau sebesar 9,953 triliun rupiah saja. Realisasi belanja modal yang rendah menyebabkan penurunan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi yang diharapkan melalui penyediaan jenis belanja ini.

2). Rasio Kemandirian Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan realisasi APBD tahun 2013, rasio PAD rata-rata seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar 12,29%. Dapat diartikan, mayoritas kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami krisis kemandirian daerah karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dibawah 50%. Sekaligus menunjukkan bahwa rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih belum optimal dalam penerimaan daerahnya. Berdasarkan realisasi APBD tahun 2013, rasio PAD rata-rata seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebesar 12,29%. Dapat diartikan, mayoritas kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami krisis kemandirian daerah karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dibawah 50%. Sekaligus menunjukkan bahwa rata-rata Kabupaten/Kota di Jawa Timur masih belum optimal dalam penerimaan daerahnya.

3). Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah

Efektivitas manajemen keuangan daerah adalah besarnya rasio realisasi APBD terhadap target APBD yang dinyatakan dalam skala rasio dan satuan persentase. Dari APBD di Jawa Timur, diketahui nilai rata-rata keseluruhan rasio efektivitas sebesar 110,51%. Nilai rata-rata efektivitas Kabupaten/Kota di Jawa Timur tersebut termasuk dalam kategori sangat efektif. Hasil ini menunjukkan bahwa secara agregat, pemerintah kota dan kabupaten di wilayah provinsi Jawa Timur dapat merealisasikan target PAD sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Rasio efektivitas tertinggi dengan rasio rata-rata diatas 125%, dicapai oleh Kota Madiun (131,03%), Kabupaten Malang (129,39%), Kabupaten Sumenep (126,60%), dan Kabupaten Kediri (125,24%). Rasio efektivitas tinggi dapat dicapai karena daerah telah berhasil mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, maupun karena penetapan target yang terlalu rendah, sehingga pencapaian target penerimaan bukan hal yang susah untuk dilaksanakan.

4). Efisiensi manajemen keuangan daerah

Efisiensi manajemen keuangan daerah adalah besarnya rasio pengeluaran belanja daerah terhadap pendapatan daerah. Rata-rata keseluruhan dari rasio efisiensi belanja pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2013 adalah 96,73%. Nilai ini menunjukkan bahwa secara agregat, pemerintah kota dan kabupaten di wilayah provinsi Jawa Timur masih kurang efisien dalam mengelola keuangan daerah. Ilustrasi rasio efisiensi belanja pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2013

Dari tiga puluh delapan Kabupaten/Kota di Jawa Timur, hanya terdapat tiga daerah yang termasuk dalam kategori cukup efisien dalam realisasi belanja, yaitu Kota Kediri (86,54%); Kabupaten Kediri (89,50%); dan Kota Mojokerto (89,85%). Ada 5 daerah yang memiliki nilai rasio yang lebih dari 100% yaitu Kabupaten Situbondo (103,66%); Kabupaten Gresik (103,08%); Kabupaten Bangkalan (101,97%); Kabupaten Blitar (101,94%); dan Kabupaten Bojonegoro (100,48%). Rasio ini menunjukkan bahwa realisasi belanja melebihi realisasi pendapatan sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan APBD di ke lima kabupaten termasuk dalam kategori tidak efisien. Sementara, 30 daerah termasuk dalam kategori kurang efisien.

3.2 Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil regresi maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 0,385 + 2,367X_1 + 0,100X_2 + 0,555X_3 + 0,215X_4$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut menunjukkan koefisien regresi dari variabel bebas bertanda positif, hal ini berarti terjadi hubungan yang positif antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Artinya peningkatan variabel belanja modal (X1), efektivitas manajemen keuangan daerah (X2), efisiensi manajemen keuangan daerah (X3) dan kemandirian daerah (X4) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Analisis atas hasil perhitungan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut :

- 1) variabel belanja modal (X1) mempunyai koefisien regresi b_1 sebesar 2,367. Hal itu berarti apabila variabel efisiensi manajemen keuangan daerah (X2), efektivitas manajemen keuangan daerah (X3) dan kemandirian daerah (X4), tetap, maka peningkatan belanja modal meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp. 2,367
- 1) variabel efisiensi manajemen keuangan daerah (X2) mempunyai koefisien regresi b_2 sebesar 0,100 atau 1%. Hal itu berarti apabila variabel belanja modal (X1), efektivitas manajemen keuangan daerah (X3) dan kemandirian daerah (X4) tetap, maka peningkatan efisiensi manajemen keuangan daerah setiap 1% menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%;
- 2) variabel efektivitas manajemen keuangan daerah (X3) mempunyai koefisien regresi b_3 sebesar 0,555 atau 55,5%. Hal itu berarti apabila variabel belanja modal (X1), efisiensi manajemen keuangan daerah (X2) dan kemandirian daerah (X4), tetap, maka peningkatan efektivitas manajemen keuangan daerah sebesar Rp 1 juta meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 0,555;
- 3) variabel kemandirian keuangan daerah (X4) mempunyai koefisien regresi b_4 sebesar 0,215 atau 21,5%. Hal itu berarti apabila variabel belanja modal (X1), efisiensi manajemen keuangan daerah (X2) efektivitas manajemen keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah (X3) tetap, maka peningkatan efektivitas manajemen keuangan daerah sebesar 1% meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 21,5%;

Hasil analisis regresi diperoleh F hitung sebesar 395,859 dan F probabilitas sebesar 0,0057. Sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Diterimanya H_a berarti secara bersama-sama variabel bebas belanja modal, efisiensi

manajemen keuangan daerah, efektivitas manajemen keuangan daerah, kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap besarnya pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis regresi untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat diperoleh hasil sebagai berikut.

- 1) variabel bebas belanja modal (X1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,660 menunjukkan bahwa probabilitast lebih dari *level significance* ($\alpha = 0,05$), H_0 ditolak dan H_a diterima berarti bahwa belanja modal (X1) secara parsial berpengaruh tidak nyata atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y);
- 1) variabel bebas efisiensi manajemen keuangan daerah (X2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,017 menunjukkan bahwa probabilitast lebih kecil dari *level significance* ($\alpha = 0,05$), H_0 ditolak dan H_a diterima berarti bahwa efisiensi manajemen keuangan daerah (X2) secara parsial berpengaruh nyata atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y);
- 2) variabel bebas efektivitas manajemen keuangan daerah (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,021 menunjukkan bahwa probabilitast lebih besar dari *level significance* ($\alpha = 0,05$), H_0 diterima dan H_a ditolak berarti bahwa efektivitas manajemen keuangan daerah (X3) secara parsial berpengaruh nyata atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y);
- 3) variabel bebas kemandirian keuangan daerah (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,011 menunjukkan bahwa probabilitast lebih besar dari *level significance* ($\alpha = 0,05$), H_0 diterima dan H_a ditolak berarti bahwa kemandirian keuangan daerah (X3) secara parsial berpengaruh nyata atau signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y).

4. Pembahasan

4.1 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah dalam bentuk alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Melalui peningkatan belanja modal APBD tersebut diharapkan menjadi faktor pendorong timbulnya berbagai investasi baru di daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk kegiatan produksi sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Bati, 2009).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal tidak akan meningkatkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi. Seharusnya pengeluaran pemerintah Jawa Timur memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan dapat menstimulus perekonomian. Misalnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong investasi, dengan adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan

lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan memperkecil kemiskinan. Tetapi belanja modal yang tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah pendapatan asli daerah sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu dikarenakan belanja modal termasuk jenis belanja langsung dan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Pembangunan dalam sektor pelayanan publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Dalam perekonomian suatu negara, belanja pemerintah memainkan peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional, terutama dalam meningkatkan dan memelihara kesejahteraan rakyat. Hal ini terutama karena besaran dan komposisi anggaran belanja pemerintah mempunyai dampak yang signifikan pada permintaan agregat dan output nasional, serta mempengaruhi alokasi sumberdaya dalam perekonomian. Sumbangan belanja pemerintah dalam produk domestik bruto (PDB) Jawa Timur tergolong cukup besar. Dengan demikian apabila anggaran belanja pemerintah gagal direalisasikan maka tidak berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi. Dana yang telah tersedia menjadi menganggur (*idle money*), sehingga berbagai infrastruktur yang semestinya terbangun menjadi terhambat perwujudannya.

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan tidak mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembanguna yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan belanja modal merupakan kebijakan dalam perekonomian yang perlu dilaksanakan ketika menghadapi masalah pengangguran yang serius. Kebijakan ini didasarkan pada anggapan bahwa di dalam masyarakat terdapat pengangguran berbagai jenis faktor produksi. Faktor-faktor produksi menganggur karena kurangnya permintaan efektif dari masyarakat. Untuk itu, perlu diciptakan permintaan efektif, yaitu dengan membuat pengeluaran yang lebih besar dari pada penerimaan. Namun ketika permintaan lebih besar dari pada penawaran akan mengakibatkan naiknya harga-harga (inflasi), dan inflasi ditengarai memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan "teori pertumbuhan mantap (*steady growth theory*)" yang merupakan pengembangan analisis Keynes, lebih menekankan peranan kunci perlunya penanaman modal dalam proses penciptaan pertumbuhan ekonomi (Suryana, 2000:66). Modal atau *capital* sebagai faktor produksi pada pembangunan ekonomi bukan dalam bentuk uang (*money*) tetapi *real capital/capital goods* (barang-barang modal) (Kamaluddin, 1996:71-72). Proses pengeluaran dana modal dalam pemerintah dikenal dengan istilah belanja modal/pembangunan (Halim dan Subiyanto, 2008:4-5). Selain itu juga hasil penelitian ini tidak sesuai dengan

penelitian Hendarmin (2012) dan Patricia dan Izuchukwu (2013) yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.2 Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Manajemen keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah dan efisiensi manajemen keuangan daerah diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan efektivitas manajemen keuangan daerah maka perencanaan anggaran dapat diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional (PPRI Nomor 58 Tahun 2005). Sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara aritmatik, pertumbuhan ekonomi secara makro dapat dihitung dari pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, tenaga kerja, dan perubahan dalam produktivitas.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin baik efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Dengan efektivitas manajemen keuangan daerah maka perencanaan anggaran dapat diperhatikan (1) Penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) Penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional (PPRI Nomor 58 Tahun 2005). Sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur. Secara aritmatik, pertumbuhan ekonomi secara makro dapat dihitung dari pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, tenaga kerja, dan perubahan dalam produktivitas. Studi yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa pertumbuhan modal merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara tertentu. Namun demikian, perubahan dalam produktivitaslah yang menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan antar daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan studi yang pernah dilakukan Wahyuni (2013) menunjukkan bahwa pertumbuhan modal merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara tertentu. Namun demikian, perubahan dalam produktivitaslah yang menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan antar negara. Sedangkan yang mempengaruhi produktivitas adalah kemajuan teknologi (*technological progress*) (World Bank, (1991: 4), dalam Mulyanto, 1999: 9). Variabel efektivitas manajemen keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4.3 Pengaruh Kemandirian Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin baik kemandirian daerah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan studi yang pernah dilakukan. Rasio kemandirian yang masih rendah dapat disebabkan pada sumber penerimaan daerah dan dasar pengenaan biaya, tampaknya Pendapatan Asli Daerah masih belum dapat diandalkan bagi daerah untuk otonomi daerah, karena relatif rendahnya basis pajak / retribusi yang ada di daerah dan kurangnya pendapatan asli daerah yang dapat digali oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sumber-sumber potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah masih dikuasai oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk basis pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang di dalam

pemungutan/pengenaannya berdasarkan undang-undang/peraturan pemerintah, dan daerah hanya menjalankan serta akan menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, DAU, DAK, penerimaan lainnya.

Pengelolaan keuangan daerah Jawa Timur sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk pengelolaan daerah tidak hanya dibutuhkan sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ekonomi berupa keuangan yang dituangkan dalam suatu anggaran pemerintah daerah. Kinerja keuangan dalam penelitian ini berupa rasio kemandirian keuangan daerah. Dengan adanya rasio-rasio tersebut dapat digunakan untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dwinandra (2009) menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal tidak akan meningkatkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi
- b. Efektivitas manajemen keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin baik efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.
- c. Efisiensi manajemen keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin baik efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.
- d. Kemandirian daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin baik kemandirian daerah maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kontribusi kemandirian daerah dan kemampuan keuangan daerah sangat diperlukan agar tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada pemerintah pusat dapat dikurangi baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi

1) Intensifikasi

- a) Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus lebih tertib lagi dalam menetapkan dan penyetoran pajak.
- b) Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c) Melakukan langkah-langkah pengendalian lain guna menghindari timbulnya penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelolaan maupun penetapan pajak dan retribusi daerah.

2) Ekstensifikasi

- a) Menggali obyek pungutan baru yang potensial dengan lebih memprioritaskan kepada retribusi daerah untuk ditetapkan dan dijabarkan dalam peraturan daerah
 - b) Meninjau kembali ketentuan tarif dan pengembangan sasaran sesuai dengan peraturan daerah yang ada dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk diajukan perubahan
- b. Sebaiknya pemerintah pusat memperhatikan lebih detail lagi daerah-daerah yang masih rendah akan pendapatan asli daerahnya, sehingga daerah tersebut mendapat transfer dana alokasi umum dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sebaiknya Provinsi Jawa Timur memprioritaskan anggaran untuk kepentingan publik dengan cara meningkatkan alokasi belanja modal untuk kepentingan publik. Sebab dengan meningkatnya alokasi belanja modal akan semakin meningkatkan investasi yang nantinya akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga akan kembali pada meningkatnya pendapatan daerah. Akan tetapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga harus efektif dan efisien dalam menentukan alokasi belanja modal, sebab dengan tingginya belanja modal tersebut akan mengakibatkan biaya rutin lainnya (biaya pemeliharaan) menjadi lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- Agenor, Pierre R. dan Blanca, Moreno-Badson. 2006. Public Infrastructure and Growth: New Channels and Implications. *World Bank Policy Research Working Paper 4064*.
- Akai dan Sakata. 2002. Fiskal Decentralization Contributes to Economic Growth: evidence from state-level cross-section data for the United States. *Journal of Urban Economics*. Vol. 52. hal. 93-108.
- Allen, Richard dan Tammasi, Daniel. 2001. *Managing a Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. OECD, Paris
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Bati. 2009. *Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara)*. Tesis USU Medan
- Chairul Nizar, Abu Bakar, Hamzah, Sofyan Syahnur. 2013. Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. ISSN 2302-0172. pp. 1-8
- Darsil, Murnil. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Dwinandra, A. 2009. *Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Ditinjau Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006*. Tesis. Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana

Analisis Pengaruh Belanja Modal, Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Serta Kemandirian

- Hakim, Abdul. 2002. Otonomi Daerah dan Kinerja Aparatu Pemerintah daerah tingkat II. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. No 1. Vol 2. FE UII : Yogyakarta
- Jhingan, ML. 2003. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Edisi Pertama. Penerbit CV Rajawali. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Dates, W.E. 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal* 46.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437*



